

DPRD Bentuk Pansus MRT

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta membentuk panitia khusus untuk mengawasi proyek mass rapid transit (MRT). Panitia itu dibuat untuk meminta penjelasan kepada pemerintah DKI ihwal perkembangan megaprojek transportasi Ibu Kota. "Misalnya tentang pengembalian pinjaman antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat," kata Ketua Pansus MRT DPRD DKI, Triwisaksana, kemarin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan pansus dibentuk pada pekan lalu. Seharusnya, kata Tri, pansus menggelar rapat perdana dengan Gubernur DKI Joko Widodo kemarin. Namun rapat itu dibatalkan karena Gubernur tak hadir. Jokowi mengaku tak mendapat undangan rapat pansus kemarin. "Saya enggak tahu," kata dia.

Salah satu saran yang akan disampaikan kepada Gubernur adalah agar pemda merevisi Peraturan Daerah tentang Pembangunan MRT. Soalnya, kata Tri, ada perubahan nilai proyek PT MRT yang awalnya Rp 9 triliun kemudian berubah menjadi sekitar Rp 16 triliun. "Itu yang ingin kami bahas," ujar Tri.

Tri berharap Direksi PT MRT dan Pemprov DKI bergerak cepat untuk membangun proyek ini. "Memang ada kemajuan dalam tahapan pembangunan, itu bagus. Tapi perda

juga harus diubah," kata dia.

Adapun perkembangan MRT mulai tampak. Setelah meneken kerja sama dengan pemenang tender jalur di bawah tanah, Selasa lalu, proses lelang tender tiga paket pembangunan jalur layang MRT sudah selesai. Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestlami, mengatakan pemenang lelang akan diumumkan segera. "Secepatnya, kalau bisa sebelum 17 Agustus," kata dia, Selasa lalu.

Ada tiga paket pekerjaan yang dilelangkan untuk proyek jalur layang dan pembangunan depo. Paket satu termasuk pembangunan depo di Lebak Bulus dan jalur

layang. Sedangkan dua paket lainnya merupakan pembangunan stasiun dan jalur layang.

Warga perwakilan Fatmawati yang akan dilewati jalur layang MRT mengaku kaget atas rencana pengumuman jalur layang MRT tersebut. Mereka selama ini getol menolak pembangunan MRT jalur layang dengan berbagai alasan. "Hingga sekarang bahkan belum pernah diajak bicara," kata perwakilan warga, Alex Tarore, yang juga anggota Masyarakat Peduli MRT, kemarin. Bahkan, menurut Alex, Wali Kota Jakarta Selatan belum terbuka untuk berdialog.

● ANGGITA DESIAN | SALENDRA